

Hegemoni dan Relasi Kuasa: Studi Kasus Tahlilan di Dusun Gunung Kekep

Slamet Makhsun^{1*}

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; makhsun310501@gmail.com

* Correspondence

Received: 30/11/2021; Accepted: 04/12/2021; Published: 30/12/2021

Abstrak: Selama ini, kebanyakan partai politik seringkali memanfaatkan identitas agama sebagai sarana pencarian suara dalam kontestasi pemilu. Oleh sebab itu, masyarakat pedesaan yang relatif masih kental budaya kerberagamaanya menjadi target sentral dalam permainan politik identitas. Tulisan ini membahas sirkulasi kekuasaan, hegemoni, relasi kuasa, dan partai politik yang menggunakan ritual tahlilan sebagai sarana kampanye dalam pencarian suara di dusun Gunung Kekep. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kasus dengan pendekatan naturalistik dan kajian literatur. Hasil dari penelitian ini bahwa tahlilan tidak semata bernilai religius, melainkan juga memiliki peran dalam membentuk nilai-nilai sosial bagi masyarakat pedesaan. Dan pada momen-momen seperti pemilu, basis sosial dari tahlilan ini acapkali menjadi media pengumpulan massa dalam melakukan kampanye sehingga turut dijadikan sarana politik. Di balik itu semua, pemuka agama menjadi penentu atas berjalannya hukum adat dan sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut, termasuk politik.

Kata Kunci: Tahlilan, Budaya, Politik, kekuasaan, Identitas

1. Pendahuluan

Sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Muslim khususnya yang berada di pulau Jawa, memiliki berbagai upacara dalam menyemayamkan dan memperingati orang meninggal, salah satunya adalah tahlilan. Budaya seperti itu, seturut dilakukan berdasarkan ajaran leluhur yang telah dilestarikan dan diajarkan dari generasi ke generasi secara terus menerus. Tidak hanya berlaku sebagai budaya semata, lebih dari itu, tahlilan telah menjadi bagian penting dalam pola kehidupan masyarakat. Terlebih masyarakat Jawa sendiri merupakan masyarakat yang agamis sehingga mentautkan tahlilan termasuk bagian dari bentuk ritual pokok. Menurut Clifford Geertz yang dikutip oleh Pals (2018), bahwa agama memiliki peran kuat dalam pembentukan budaya suatu masyarakat. Oleh sebabnya, budaya yang telah memiliki nilai-nilai agama tersebut tetap lestari dan sulit tereduksi.

Hal di atas, sependapat dengan perkataan Ki Ageng Suryomentaraman yang dituturkan dalam serat Kawaruh Jiwa-nya. Menurutnya, setiap orang memiliki dorongan secara alamiah untuk menyembah kekuatan supranatural diluar dirinya, karena dianggap dapat memberikan perlindungan dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya (Afif, 2020). Masyarakat Jawa sebelum agama-agama besar datang—Hindu, Budha, Islam, Kristen—sudah memiliki ritual dalam menyemayamkan orang mati. Sehingga masuknya agama-agama besar itu ke Jawa, bukan merubah adat yang sudah ada. Malahan justru semakin mewarnai pola budaya yang terbentuk (Karim, 2017).

Fleksibilitas ajaran Islam turut mendukung hal tersebut. Islam adalah agama yang cepat berkembang dan adaptif, sehingga tahlilan bisa menjadi sebuah ritus yang populer di masyarakat Jawa merupakan hal yang wajar. Selain itu, strategi dakwah yang diterapkan oleh komunitas pendakwah Islam di Jawa pada rentang waktu abad 14 sampai 16 Masehi —yang sering disebut Walisongo— juga sangat akomodatif (Tajuddin dkk., 2014). Mereka memasukkan nilai-nilai Islam dalam lokalitas Jawa, sehingga masyarakat Jawa mengenal dan memeluk Islam berkat adanya budaya yang digubah oleh Walisongo. Hal itu juga diamini oleh Syamsuatir dan Ahmad Mas'ari (2021), bahwa berkembangnya Islam secara cepat dan masif di pulau Jawa, bukan karena faktor politik atau militer, melainkan melalui pendekatan jalur budaya. Bila dielaborasi lebih jauh, maka demikian itu karena Walisongo menggunakan maqashid asy-syariah dalam mengejawantahkan produk fikih dalam konteks lokalitas masyarakat Jawa. Seperti halnya perkataan Ibnu Asyur yang dikutip oleh Zaprulkhan (2020) bahwa maqashid asy-syariah adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan utama dalam menentukan status hukum fikih dengan sekiranya tujuan tersebut tidak hanya berlaku terhadap satu produk hukum syariat secara khusus saja. Walisongo berhasil mengakulturasikan lokalitas setempat nilai-nilai Islam, yang kemudian masyarakat mudah dalam memahami serta menerima ajaran Islam, sehingga tidak kaget dengan nilai-nilai Islam yang bersifat baru bagi mereka. Demikian ini yang membuat ajaran Islam dapat diinfiltrasikan secara pelan-pelan tanpa adanya resistansi.

Pada tahap selanjutnya, di paruh awal abad 19 (sampai sekarang masih berlanjut), mulai bermunculan Islam gelombang baru dengan ciri khas pemahaman dan tafsir yang saklek, yang dengan keukeuh menolak ajaran-ajaran yang telah Walisongo wariskan, termasuk tahlilan, karena dianggap bukan ajaran

Islam yang murni. Kebanyakan dari mereka, menerima dogma yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab —kemudian disebut kelompok Wahabi—yang cenderung eksklusif dan kaku. Simuh (2019) juga mengatakan bahwa kelompok ini terkait pemahaman Al-Quran dan Hadis cenderung harfiah, tidak banyak membutuhkan pemikiran. Bahkan, jika suatu budaya tidak disebutkan dalam Al-Quran serta tidak Nabi Muhammad ajarkan, maka hal itu tertolak, bahkan diharamkan (Shidqi, 1970).

Tentu, beberapa tokoh agama Islam yang sepakat dan meneruskan pemahaman Islam versi Walisongo itu, merasa khawatir. Jika hal tersebut dibiarkan, maka dalam jangka waktu yang panjang, Islam yang mereka anut itu akan punah. Dalam artian, diganti dengan Islam yang eksklusif dan kaku. Lalu beberapa ulama dan kyai yang ada di Jawa dan Madura, pada tahun 1928 membuat organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki spirit untuk mempertahankan ajaran Islam versi Walisongo (Rahem, 2017). Yang berarti pula, sebagai sebuah konter narasi terhadap pihak-pihak yang menuduh bahwa amalan mereka itu sesat dan tanpa dasar Islam.

Taufik Bilfagih (2016) menyebutkan bahwa NU sendiri ialah ormas keagamaan yang merepresentasikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yang dalam beberapa poinnya, cenderung menerima lokalitas budaya setempat yang tidak bertentangan dengan prinsip pokok Islam. Hal ini tercermin dalam salah satu kaidah fiqh yang menjadi semboyan NU—*al mukhafadzu qadim as sholih wal akhdu ala jadid al ashlah*. Menjaga budaya lama yang baik, serta mengambil budaya baru yang baik pula. Karena tahlilan dianggap sebagai budaya yang baik, maka sampai detik ini pun masih dilestarikan oleh NU.

Di tahun-tahun awal kemerdekaan (sampai sekarang masih berlanjut), sebenarnya banyak bermunculan ormas Islam yang membawa ideologinya masing-masing. Mereka lalu diberi ruang dalam mengaspirasikan pendapatnya di tataran pemerintahan melalui partai Masyumi, termasuk NU (Gonceng, 2015). Hal tersebut kian merubah dinamika NU. Masyumi dianggap sebagai partai yang mewakili suara dari umat Islam, namun dalam berjalannya waktu, NU yang terbilang memiliki jamaah paling banyak serta sumbangsih yang besar terhadap kemerdekaan, merasa tidak diberi tempat dan peran yang berarti dalam partai tersebut. Malahan ormas lain yang dalam kalkulasi jamaahnya terbilang sedikit ketimbang NU, menduduki jabatan strategis. Akibatnya, NU tidak bisa banyak bergerak dan cenderung direduksi gerakannya oleh ormas lain. Atas dasar

kecemburuan itulah, lalu pada tanggal 5 April 1952 secara tegas NU menyatakan sikap untuk keluar dari Masyumi, dan kemudian mendirikan partainya sendiri yang diberi nama partai NU.

Di masa-masa NU menjadi partai politik, segala hal yang menjadi kebiasaan dari jamaah NU, mulai berubah menjadi identitas politik. Menurut Agustino (2020), secara sederhana, politik identitas adalah proses pengakomodiran dan penyatuan beragam identitas ke dalam self-image dan self-concept seseorang atau suatu kelompok. Karena NU merupakan partai yang berangkat dari Islam warisan Walisongo, maka identitas yang tampak dan diperkuat ialah segala hal yang berkaitan dengan apa yang Walisongo ajarkan, termasuk tahlilan. Persaingan partai politik tidak hanya selesai pasca pemilu saja. Namun, masih berlanjut di wilayah akar rumput, sehingga masyarakat terdikotomi dalam beberapa kelompok berdasarkan pilihan partainya, yang kemudian malah saling bermusuhan.

Pada awalnya tahlilan merupakan ritus yang bersifat umum, maka pada masa NU menjadi partai politik, tahlilan semakin melekat dan mengalami pengkhususan sebagai ritus yang hanya dimiliki NU. Tahlilan menjadi ciri khas dari kelompok pemilih partai NU. Hal ini berarti bahwa ketika ada masyarakat yang tahlilan, secara otomatis akan dicap sebagai pendukung partai NU. Sebaliknya, mereka yang tidak mengamalkan tahlilan berarti bukan kelompok NU dan bukan pendukung partai tersebut. Oleh karenanya, ketika ormas keagamaan menjadi gerakan politik, ritus-ritus yang sering diamalkan akan mengalami dekonstruksi makna (Jati, 2014). Tahlilan yang semula dipandang sebagai upacara mendoakan orang mati, berubah menjadi ciri khas bagi orang-orang yang berafiliasi dengan partai NU. Berlanjut di era Suharto, turut diputuskan tentang aturan penyederhanaan partai politik, sehingga berakhir sudah kiprah NU sebagai partai politik. Hal itu, juga dilandasi dari hasil Muktamar NU ke-26 di Semarang yang diselenggarakan dari tanggal 5 sampai 11 Juni 1979 yang mencapai kesepakatan bahwa secara sah NU akan kembali menjadi organisasi masyarakat (Sayuti dan Sodiq, 2018).

Kenyataan di atas, tentu memiliki pengaruh terhadap realitas tahlilan. Saat dulu menjadi ciri khas dari budaya masyarakat yang berafiliasi dengan partai NU, maka setelah NU kembali menjadi organisasi sosial keagamaan, praksis tahlilan dalam masyarakat tentu akan berbeda. Berbeda dengan hal itu, penelitian yang dilakukan oleh Hatimah dkk. (2021) dalam masyarakat Banjar di kecamatan

Pahandut kota Palangka Raya, mengatakan bahwa tahlilan lebih berfungsi sebagai pranata sosial. Dengan adanya tahlilan, membuat sanak kerabat yang tinggal jauh dapat meluangkan waktu untuk berkumpul, bahkan mengadakan arisan sekaligus sehingga semakin mempererat silaturahmi dan hubungan emosional.

Atas dasar pemaparan di atas, dalam penelitian kali ini penulis mengkaji dan menelaah keterkaitan antara tahlilan dengan relasi kuasa, baik bagi politikus yang berafiliasi dengan ormas NU, tokoh agama, dan masyarakat yang bersinggungan dengan NU. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tahlilan menjadi basis sosial yang pada momen-momen kontestasi pemilu sering digunakan sebagai sarana pencarian suara dengan melibatkan politik identitas. Adapun lokasi penelitiannya berada di dusun Gunung Kekep, desa Nglondong, kecamatan Parakan, kabupaten Temanggung, propinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan naturalistik dan kajian literatur. Pengumpulan data diambil dari hasil pengamatan secara langsung dan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, kehidupan penulis yang kurang lebih 15 tahun menetap di dusun Gunung Kekep, sedikit banyak tahu bagaimana realita yang terjadi di dusun tersebut. Termasuk ritus-ritus tahlilan dan praktik keagamaan lainnya yang diselenggarakan di dusun Gunung Kekep, telah seringkali penulis ikuti.

2. Hasil Penelitian

Gramsci dan Hegemoni Sosial-Politik

Secara akar kata, hegemoni berasal dari bahasa Yunani, egemonia yang berarti penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya. Menurut Gramsci (Siswati, 2018), hegemoni ialah sebuah konsensus atau kesepakatan yang menghasilkan ketertundukan melalui ideologi penerimaan kelas. Di sini lebih menekankan bahwa hegemoni bukan dominasi atas sebuah kekuasaan, melainkan menggunakan kepemimpinan ideologi dan politik. Hegemoni di dapat ketika masyarakat kelas bawah meniru dan menerima cara hidup masyarakat kelas atas, sehingga alih kuasanya pun secara pelan-pelan tidak terasa.

Hegemoni lebih dekat dengan pendekatan budaya dan sosial. Suatu kelompok ketika ingin ditaklukan, tidak harus dengan mengangkat senjata. Cukup dengan mempengaruhinya secara budaya dan ideologi, sehingga lambat laun akan menyetujui segala sesuatu yang datang dari kelompok yang ditirunya. Dalam

tatarannya, setidaknya dapat disimpulkan tiga macam premis dari apa yang telah dikemukakan oleh Gramsci (Agung, 2015). Pertama, hegemoni didapatkan melalui jalur konsensus dari beragam kekuatan sosial politik. Kedua, dalam mempertahankannya, kelas yang menghegemoni terus membuat terobosan agar kelompok yang dihegemoni tersebut tetap dalam kekuasaan dan tidak berontak, misalnya dengan membuat sistem ekonomi dan kelembagaan pendidikan. Tiga, kelompok yang menghegemoni akan hancur kekuasaannya jika kelas yang dihegemoni telah sadar dan memunculkan aksi gerakan massa.

Apa yang terjadi antar kelompok ini sebenarnya adalah pertarungan wacana dan ideologi. Suatu kelompok yang memiliki kematangan ideologi yang lalu dianggap benar oleh kelompok lain, maka ia telah menuai kemenangan. Sebaliknya, kelompok yang tidak memiliki wacana yang bagus, hanya dapat menurut. Gramsci menyebut gerakan tersebut sebagai revolusi moral dan intelektual. Seseorang yang memiliki kapabilitas intelektual yang mumpuni, maka akan menjadi tokoh yang ditaati oleh banyak orang. Orang itu akan dengan mudah memerintah orang lain karena apa yang ia perintah dianggap benar. Oleh sebabnya, hegemoni apapun bentuknya yang dialami oleh suatu kelompok, akan runtuh ketika muncul orang-orang dari kelompok tersebut yang memiliki kapabilitas intelektual, yang lalu menyadarkan anggotanya dan menggalang gerakan aksi massa. Di tahap ini, Gramsci menafsirkan intelektual bukan hanya mereka yang memiliki keahlian dalam cabang-cabang keilmuan, namun juga orang yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam lapisan masyarakat, dalam wilayah produksi, politik ataupun budaya.

Atas dasar itu, penulis menggunakan telaahnya Gramsci dalam membedah sosial-politik yang terjadi dalam masyarakat dusun Gunung Kekep. Sebab, tokoh atau pemuka agama memiliki jalinan dan hierarki yang kuat dalam masyarakat.

Bagi kelas penguasa —yang dalam konteks masyarakat beragama dipegang oleh tokoh agama— posisi yang ditempatinya memiliki peran besar dalam menata dan mengatur perilaku sosial masyarakatnya (Turner, 2012). Lebih-lebih dalam beberapa agama, teks-teks suci yang diamini sebagai perkataan Tuhan, secara tegas menyuruh umatnya agar taat dan patuh terhadap pemuka agama. Demikian juga sama dikatakan oleh Abdul Munir Malkan (2020) bahwa ketika tokoh agama dipandang memiliki sejumlah wewenang yang lebih atas jamaahnya, membuatnya mendapat dorongan dan inspirasi atas pembentukan

hukum publik keagamaan. Alhasil, hegemoni pemuka agama dalam masyarakat sangat kuat.

Kondisi Geografis dan Sosial-Budaya Masyarakat dusun Gunung Kekep

Dalam observasi lapangan oleh penulis, dusun Gunung Kekep kurang lebih memiliki 150 KK (Kepala Keluarga) yang wilayahnya terletak di kaki Gunung Sindoro. Pola rumah didirikan secara mengelompok, sehingga satu dusun tersebut hanya memiliki satu kelompok perumahan. Di sebelah timur perumahan warga, terdapat satu bukit (tidak terlalu besar) yang banyak ditanami pohon bambu dan pohon sengon. Di sebelah utaranya terdapat sungai yang cukup besar, serta di sebelah selatan perumahan warga terdapat hamparan sawah yang luas. Kontur tanahnya sedikit melandai, sehingga hal tersebut memudahkan petani dalam irigasi sawah. Selain itu, ketersediaan sumber mata air melimpah, serta memiliki tekstur tanah yang subur.

Bentang alam seperti itu, membuat sebagian besar warga dusun Gunung Kekep bermata pencaharian sebagai petani. Berdasar wawancara dengan kepala dusun setempat, warga dusun bermata pencaharian sebagai petani memang karena warisan dari orang tua atau leluhurnya. Ketika dalam satu keluarga memiliki sawah, maka anak-anaknya diminta meneruskan usahanya. Letak dusun yang tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi, seperti pasar, memudahkan petani dalam penjualan hasil panen. Inilah salah satu faktor yang sedari dulu sampai sekarang menjadikan warga dusun Gunung Kekep tetap istikamah bertani. Walau sebenarnya ada warga yang bermata pencaharian bukan sebagai petani, namun jumlahnya relatif sedikit. Hal tersebut juga diamini oleh sekretaris desa setempat, bahwa jika dikalkulasikan, kurang lebih 25% dari jumlah total populasi warga dusun Gunung Kekep berkerja selain di sektor sawah. Mereka seperti itu, kebanyakan memang karena tidak memiliki sawah, yang kemudian terbagi dalam beberapa kelompok seperti guru, ASN (Aparatur Sipil Negara), pedagang, buruh pabrik, dan buruh bangunan.

Dari segi keagamaan, kultur masyarakat dusun Gunung Kekep terbilang masuk dalam klasifikasi Islam tradisional. Islam tradisional dalam konteks ini ialah umat Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis serta hasil dari ijtihad ulama terdahulu tanpa adanya analisa dan interpretasi yang mendalam (Syam, 2018). Menurut salah satu tokoh agama setempat, masyarakat tersebut mempelajari agama secara non-formal kepada warga dusun yang dianggap

memiliki pemahaman agama Islam yang mendalam. Tolak ukur yang digunakan, biasanya jika ada warga dusun yang belajar di pesantren (yang berafiliasi dengan NU), ketika pulang secara otomatis akan disuruh mengajarkan ilmu agama yang didapatnya. Dan hal itu, terjadi dari setiap generasi ke generasi, sehingga tidak ada perbedaan dalam aliran keagamaan Islam yang berarti. Secara sederhana, mereka termasuk NU kultural, yakni yang mengamalkan amaliah seperti yang NU gagas, namun tidak terlalu terikat dengan struktural. Sebenarnya juga sudah dibentuk struktural NU, namun bagi warga dusun, hal-hal seperti itu sudah cukup bila sudah ada yang mewakilinya. Oleh sebabnya, mereka yang duduk di struktural NU dusun Gunung Kekep ialah orang-orang yang berpengaruh.

Terhadap ritual-ritual dan kebudayaan masyarakat dusun, sudah terbentuk secara turun temurun. Mereka persis mengamalkan seperti yang NU gagas. Pandangan keagamaan masyarakatnya cenderung akomodatif dengan lokalitas Jawa. Bahkan, mereka masih keukeuh beranggapan jika lokalitas Jawa tersebut tidak diamalkan, maka akan datang bala dan musibah (Syukur dan Qodim, 2017). Misalnya adat pernikahan. Ketika rombongan mempelai pria berkunjung ke rumah mempelai wanita, maka mempelai pria harus menyiapkan satu ayam jantang, dan ketika di tengah-tengah perjalanan, ayam tersebut dilepasliarkan. Entah di sawah, sungai, atau perbukitan. Menurut tokoh adat setempat, hal tersebut dilakukan supaya prosesi pernikahannya terhindar dari musibah serta agar kedua mempelai dimudahkan urusannya oleh Tuhan.

Perpaduan lokalitas dan agama semacam itu, sebenarnya memang menjadi karakteristik umum bagi masyarakat Jawa. Menurut Geertz dalam analisisnya Pals (2018), sistematis yang terbentuk ialah balancing dan akulturasi antara agama dan budaya. Ruang-ruang budaya yang bisa dimasukkan nilai agama maka tetap dipertahankan, sebaliknya, budaya-budaya yang bertolak belakang dengan spirit agama dihilangkan. Nilai-nilai seperti inilah, yang dulu menjadikan Walisongo relatif cepat dalam mengislamkan hampir keseluruhan pulau Jawa.

Bisa dikatakan, hampir semua kegiatan dusun yang dilakukan secara bersama-sama, kebanyakan memiliki kaitan dengan agama. Walaupun ejawantahnya bukan ritus formal agama, namun sangat ketara bagaimana nilai-nilai agama terkandung di dalamnya. Misalnya dalam upacara menyemayamkan orang meninggal, membersihkan mata air dan pekuburan ketika menjelang bulan Ramadhan, saling memberikan “Bubur Suro” antar warga pada tanggal 10 Muharram, memulai panen dengan mengundang tetangga untuk berdoa dan

kemudian dilanjutkan makan ingkung bersama. Semua ritus tersebut berangkat dari nilai agama, sehingga, bisa diklaim bahwa agama telah masuk secara kuat ke dalam nilai-nilai budaya mereka. Selain daripada itu, seremonial keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama telah membuat mereka menjadi satu kesatuan yang utuh. Memang, salah satu fungsi ritual keagamaan ialah untuk membuat anggota masyarakat tersebut dalam suatu himpunan yang sama, sehingga sekat-sekat yang bersifat individualistik hilang. Yang lalu menumbuhkan rasa solidaritas dan memupuk persatuan kelompok (Faiz, 2021).

Sejarah dan Dinamika Tahlilan di Dusun Gunung Kekep

Secara terminologi, dalam Andi Warisno (2017), tahlilan berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk mashdar dari Fiil Madli, yakni hallala-yuhallilu-tahlilan. Kata tersebut dapat diartikan sebagai “ekspresi kesenangan” atau “ekspresi keriang”. Sedangkan secara istilah, tahlilan ialah kegiatan yang dilakukan secara berjamaah dalam rangka mendoakan orang yang meninggal.

Bacaan dalam Tahlilan sendiri, secara berurutan diawali dengan membaca tawasul berupa Surat Al-Fatihah, Surah Al-Ikhlâs, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas, awal Surah Al-Baqarah (ayat 1-6), Surah Al-Baqarah ayat 163, Ayat Kursi, Surah Al-Baqarah ayat 284-286, Surah Hud ayat 73, Surah Al-Ahzab ayat 33 dan 56, Sholawat Nabi, Salam Nabi, Surat Ali Imran ayat 173, Surat Al-Anfal ayat 40, Hauqalah, Istighfar, Hadis keutamaan Tahlil, kalimat Tahlil (lailaha illallah), dua kalimat Syahadat, dan diakhiri dengan doa tahlil (Buku Yasin dan Tahlil, 2009).

Pelaksanaan tahlilan, biasanya dilakukan setelah ada orang yang meninggal (Rodin, 2013). Yakni setiap malam berturut-turut sampai genap tujuh hari dari kematian orang tersebut, lalu dilanjutkan tepat ketika malam 40 hari, malam 100 hari, dan malam 1000 hari dari kematian. Selain itu, juga dilakukan beruntun setiap tahunnya tepat di hari kematian yang sering disebut dengan istilah haul. Tahlilan juga dilaksanakan pada momen-momen tertentu, misalnya pernikahan, pengajian dusun, atau nyadran (membersihkan pekuburan dan tempat-tempat tertentu ketika menjelang bulan Ramadhan). Selain pada momen-momen tersebut, tahlilan telah digelar sebagai rutinitas mingguan, yakni setiap malam Jumat yang dilakukan secara berkelompok dan bergilir dari rumah ke rumah. Bagi masyarakat dusun Gunung Kekep, malam Jum'at dianggap sebagai malam khusus yang memiliki fadhilah untuk mengirim doa dan membacakan tahlil bagi orang yang sudah meninggal (selain malam atau hari yang tadi telah disebutkan).

Di dusun tersebut, setidaknya tahlilan terbagi menjadi tiga kelompok besar. Pertama, kelompok bapak-bapak, yakni terdiri dari kepala keluarga dari setiap rumah. Dan kemudian dibagi lagi menjadi empat jamaah tahlilan, yakni jamaah tahlilan bapak-bapak RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04. Kedua, jamaah tahlilan ibu-ibu. Jamaah ini terdiri dari ibu-ibu rumah tangga. Terbagi lagi menjadi dua kelompok, yakni jamaah tahlilan ibu-ibu gabungan RT 04 dengan RT 03, dan jamaah tahlilan ibu-ibu gabungan RT 01 dan RT 02. Ketiga, jamaah tahlilan anak-anak dan pemuda. Jamaah ini, terdiri dari satu kelompok dan partisipannya anak-anak dan pemuda dari RT 04, RT 02, dan RT 03. Pemuda dan anak-anak dari RT 01 memang tidak ada yang ikut. Hal itu karena memang konstruk budaya di RT tersebut beda dengan RT yang lainnya.

Mengutip dari website NU Online tentang muasal tahlil, seperti yang dijelaskan oleh KH Muhammad Danial Royyan dalam karyanya yang berjudul Sejarah Tahlil, bahwa yang kali pertama menyusun bacaan dan mengamalkannya ialah ulama yang menetap di Yaman, Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad (w. 1132 H). Hal itu diperkuat dengan tulisan Sayyid Alwi bin Ahmad bin Hasan yang mengatakan bahwa kebiasaan Imam Haddad setelah membaca ratib (kumpulan wirid dan doa) adalah membaca Tahlil. Hal itu kemudian diikuti oleh para jamaahnya. Jika menggunakan dasar demikian, maka kemunculan ritus tahlilan di Jawa di kisaran abad 17. Karena banyak pendakwah Islam yang datang ke tanah Jawa yang berasal dari Yaman, yang kemungkinan besarnya mereka adalah murid ataupun keturunan Imam Haddad.

Berbeda dengan hal itu, Agus Sunyoto (2017) lebih menekankan kepada studi historis di masyarakat Jawa sendiri. Dulu, ketika era kerajaan Majapahit yang notabenenya menjadikan Hindu sebagai agama resminya, turut digaungkan beberapa ritual dalam menyemayamkan orang mati, misalnya ritual sadranan. Sama halnya dengan tahlilan, dalam beberapa kitab Hindu juga ditemukan teks-teks yang membahas demikian. Abdul Karim (2017) menjelaskan seperti dalam kitab Manawa Dharma Sastra Weda disebutkan; "Termasyhurlah selamat yang diadakan pada hari pertama, ketujuh, empat puluh, seratus, dan seribu." Selain itu, perihal penyembelihan kurban untuk orang mati pada hari-hari yang telah disebutkan tersebut juga termuat dalam kitab Bagawatgita; "Tuhan telah menciptakan hewan untuk upacara kurban, upacara kurban telah diatur sedemikian rupa untuk kebaikan dunia."

Melihat tradisi yang sudah berjalan di masyarakat Jawa, lantas Walisongo tidak langsung merubahnya secara total. Yang mereka gunakan yakni strategi dakwah secara halus, sehingga masyarakat Jawa bisa pelan-pelan paham dan mau memeluk Islam. Atas dasar hal itu, ritual menyemayamkan dan memperingati orang mati di era Majapahit diakulturasikan dengan budaya Islam. Hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Islam dibuang dan diganti dengan ritus islami, sementara yang tidak bertentangan tetap dipertahankan. Misalnya bacaan mantra diganti dengan baca doa dan ayat Al-Quran dan begitu seterusnya sampai benar-benar bersih dari hal-hal yang dianggap musyrik.

Masuknya tahlilan di dusun Gunung Kekep sudah sangat lama. Dalam penelusuran penulis, misal ketika melihat makam-makam yang ada di dusun tersebut, sama sekali tidak ditemukan makam yang bernuansa dari agama Kristen atau Hindu. Yang ada hanya makam Islam. Pun demikian, terdapat satu makam yang dianggap paling sakral dan keramat, yakni makamnya Mbah Sumber. Menurut tokoh dusun setempat, Mbah Sumber merupakan ulama yang pertama kali membuka dan menempati dusun tersebut. Karena leluhur yang pertama kali menempati dusunnya adalah seorang Muslim, secara otomatis budaya yang dibawa sudah terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, termasuk tahlilan. Singkatnya, Islam yang ada di dusun Gunung Kekep adalah Islam turunan, bukan karena memeluk dan menjadi mualaf.

Menurut salah satu penduduk, tahlilan juga dipandang sebagai sarana penyambung ruhani antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Maksudnya ialah ketika seseorang membacakan tahlil bagi orang yang mati, maka secara tak langsung orang itu akan teringat dengan orang yang dibacakan tahlil tersebut. Sehingga, orang yang sudah mati lantas tidak dilupakan saja, namun masih hidup dalam benak orang yang mendoakannya. Islam juga mengajarkan bahwa ketika seorang Muslim mendoakan orang mati, maka Tuhan akan memberi ampunan dan meringankan siksa orang mati tersebut (Imaduddin, 2020).

Dalam penyelenggaraannya, tahlilan di dusun Gunung Kekep dilakukan dalam dua macam, yakni secara individu dan berjamaah. Namun pelaksanaan secara berjamaah lebih dominan. Menurut penduduk dusun tersebut, dengan menghadirkan banyak orang, maka semakin banyak pahala yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal, sehingga ampunan Tuhan semakin terbuka luas. Jumlah penduduk yang banyak, membuat orang yang mejadi tuan rumah

pelaksanaan tahlilannya turut menyediakan hidangan yang seringkali disebut berkat. Dan pada hilirnya, berkat juga dianggap sebagai sedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang di tahlilkan.

Jika dipandang dari sisi sosiologi, hal diatas akan semakin menambah kesolidan antar warga. Durasi berkumpul yang semakin banyak, menjalin mereka dalam pola komunikasi yang seragam (Newman, 2021). Oleh sebabnya, jika ada penduduk dan berbeda dengan mereka —tidak ikut tahlilan misalnya— akan dipandang sebelah mata dan cenderung dimusuhi. Orang tersebut akan dicap pelit dan tidak menghargai terhadap kerabat atau leluhur yang sudah mati. Implikasi selanjutnya, akan dianggap bukan sebagai “ahlussunnah wal jamaah” dan bukan lagi termasuk jamaah NU. Hal inilah yang juga menjadi akar identitas ke-NUan.

Dulu di era Presiden Suharto, telah disepakati tentang aturan penyerdehanaan partai politik menjadi empat partai; PDI yang mewakili kalangan nasionalis, Golkar yang mewakili golongan pemerintah, dan PPP yang mewakili kalangan umat Islam (I Gede Yusa dkk., 2016). Menurut tokoh agama dusun Gunung Kekep, era tersebut merupakan perpecahan yang sengit antar penduduk dusun. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan besar, yakni yang berafiliasi dengan partai Golkar (Golongan Karya) yang biasanya dari keluarga besar pejabat desa, dan penduduk yang berafiliasi dengan partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang lumrahnya dari kalangan yang memiliki kedekatan dengan NU (alumni pesantren) serta wong cilik. Hal tersebut kemudian memecah tahlilan menjadi dua kubu berdasarkan pilihan partai politik. Pun demikian ketika kontestasi pemilu datang, karena politikus yang berasal dari PPP kebanyakan berasal dari NU, maka dengan massif mencari suara di arena tahlilan. Berbeda dari politikus Golkar yang ketika kampanye tidak menggunakan sarana tahlilan melainkan menggunakan jalur dari rumah ke rumah.

Pasca Suharto lengser, dinamika politik pun berubah. Era reformasi telah menyatukan warga dusun Gunung Kekep. Tidak lagi ada pengkotak-kotakkan masyarakat secara sengit. Mereka bertemu dalam titik kesatuan, yakni jika datang kontestasi politik, maka akan memilih calon yang berafiliasi dengan NU. Masa reformasi turut melahirkan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang diinisiasi oleh Gus Dur yang tentunya banyak tokoh-tokoh NU yang bergabung dengan partai tersebut, maka lumbung suara penduduk dusun Gunung Kekep kebanyakan tercurah kepada tokoh NU yang berkiprah di PKB dan PPP. Selain adanya kontestasi dalam pemilu, dalam pemilihan kepala desa juga demikian. Intinya,

yang menjadi tolak ukur dalam memilih calon ialah apakah orang tersebut berafiliasi dengan NU atau tidak, pernah melakukan sumbangsih atau tidak.

Analisis Tahlilan Terhadap Relasi Kuasa dan Identitas Sosial-Politik Masyarakat Dusun Gunung Kekep

Tokoh Agama dan Tahlilan

Gramsci mengatakan bahwa modal seseorang atau suatu kelompok ketika ingin menghegemoni ialah kapabilitas intelektual. Namun kapabilitas intelektual di sini, dimaksudkan sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok. Jika kelompok tersebut dalam masyarakat agraris, maka syarat kapabilitas intelektualnya meliputi keahlian bercocok tanam dan memiliki lahan yang luas untuk bertani. Jika kelompok tersebut dalam tataran lembaga pendidikan, maka syarat kapabilitas intelektualnya meliputi strata pendidikan beserta titel dan buku-buku atau karangan ilmiahnya. Dalam masyarakat beragama, maka seseorang yang dipilih dan ditaati sebagai pemimpin ialah sosok yang paham betul dengan agama. Oleh sebabnya, pendidikan di pondok pesantren, kajian ilmu agama yang mendalam, serta penerapan perilaku kehidupan dengan mengejawantahkan nilai-nilai agama menjadi modal utama kapabilitas intelektual seseorang ketika menjadi pemuka agama (Fauziyah dan Nasionalita, 2018).

Dalam berjalannya waktu, pemuka agama menjadi tempat dimintanya petunjuk-petuah kehidupan. Hal ini secara langsung membuat masyarakat dalam kendali dan hegemoninya. Di saat yang sama, hegemoni pemuka agama juga mendapat dukungan dari teks-teks agama Islam, misalnya seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa ulama adalah para pewaris nabi. "Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu, maka barangsiapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak," (HR At-Tirmidzi). Hadis ini menyiratkan bahwa ulama atau pemuka agama yang dalam konteks masyarakat Jawa disebut sebagai kyai (Abimanyu, 2021), memiliki kedudukan setingkat di bawah nabi. Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup menjadi sosok yang multi dimensi. Beliau menjadi pemimpin agama, pedagang, hakim, pemimpin negara, menjadi seseorang yang perilakunya wajib diteladani oleh umat Islam. Sehingga, tidak aneh jika ada ulama yang berkecimpung dalam banyak hal, misalnya dalam hal politik, sebab, nabi juga mewariskan atau mencontohkan

demikian. Selain itu, hegemoni kyai juga diperkuat dengan surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*" Ayat tersebut mendorong umat Islam untuk taat kepada ulil amri. Dalam bidang pemahaman agama, ulil amri di sini berarti pula orang yang paham dengan ilmu agama, yakni kyai atau pemuka agama (Wafa, 2021).

Dalam perkembangannya, ejawantah agama Islam yang ada di dusun Gunung Kekep telah menjadikan tahlilan sebagai konsepsi dan realitas agama tersebut (Bauto, 2016). Budaya tahlilan yang sudah mendarah daging secara tak langsung telah membentuk hierarki kekuasaan sosial-politik dalam masyarakat. Hal ini bukan berarti menafikan peran dari pejabat desa atau dusun, melainkan mereka termasuk masyarakatnya memasrahkan keputusan tertinggi kepada orang yang dianggap paling bijak. Karena masyarakat dusun Gunung Kekep adalah masyarakat yang semuanya beragama Islam, maka orang yang dianggap paling bijak ialah tokoh agama atau kyai.

Masyarakat pedesaan sendiri memiliki kecenderungan sifat komunal yang kental. Mereka selalu merujuk kepada hal-hal yang bersifat seragam dan satu. Menurut Abdur Rozaki (2016), kebijakan pada suatu komunitas pasti akan bergantung kepada orang kuat —misal kepada tokoh agama atau orang kaya. Bahkan tanpa orang kuat ini, masyarakat akan terpecah belah. Oleh sebabnya, tokoh agama menjadi tempat bergantungnya masyarakat pedesaan dalam ranah sosial keagamaan. Tokoh agama sering dimintai solusi bagi problem kehidupan masyarakat. Misal ketika ada gesekan atau perpecahan antar anggota masyarakat, maka akan dibawa ke hadapan tokoh agama, diadili dan didamaikan. Tokoh agama acapkali menjadi orang yang dimintai pendapat semisal ketika ada musyawarah warga. Alhasil, tokoh tersebut juga memiliki proksi sebagai pemimpin politik dalam masyarakat walaupun bukan secara struktural. Bahkan, kepopuleran dan pengaruh kepala desa atau kepala dusun, kalah jauh dengan tokoh agama.

Dari pengamatan penulis, proses seseorang untuk menjadi tokoh agama di dusun Gunung Kekep bermula ketika bisa memimpin tahlil. Jika sudah biasa dan sering disuruh memimpin tahlil, biasanya akan merambah kepada ritus-ritus agama yang lain. Contohnya seperti maulidan, akikahan, menjadi imam masjid, mengurus prosesi pemakaman orang yang meninggal, bahkan menjadi saksi atau penghulu nikah. Biasanya mereka yang menjadi tokoh agama, merupakan alumni

pesantren. Mereka sudah belajar ilmu agama Islam secara bertahun-tahun sehingga masyarakat sudah mengakui kapabilitas keilmuannya.

Proyeksi seperti inilah yang menjadikan masyarakat menganggapnya sebagai tokoh yang patut diikuti dan ditaati. Jika dalam masyarakat Barat orang-orang kaya disebut kaum Borjuis yang mampu mengendalikan massa dengan kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya (Trotsky, 2020), maka dalam konteks dusun Gunung Kekep tokoh agamalah yang mengendalikan masyarakat. Meminjam bahasanya Karl Marx yang dikutip oleh Peter Singer (2021), tokoh agama telah menjadi dalang adanya 'materialisme sejarah'. Mereka yang secara tidak langsung mengatur jalan sejarah masyarakatnya. James Fulcher (2021) mengatakan bahwa salah satu faktor terbentuknya kapitalisme di abad modern ini termasuk dari kalangan agamawan. Maraknya pemaksaan dan perebutan keuntungan dari masyarakat oleh beberapa kelompok, seringkali menggunakan dalih-dalih agama. Namun agaknya, perkataan James Fulcher paradoks dengan apa yang terjadi dalam masyarakat dusun Gunung Kekep. Tokoh agama di dusun tersebut, sangat jarang menggunakan posisinya untuk mengambil keuntungan pribadi. Dasar teologis Islam, menyuruh para pemimpinnya untuk berbuat seadil-adilnya (Umar, 2020). Tolak ukur seperti ini yang digunakan oleh masyarakat dusun Gunung Kekep. Jika tokoh agama seringkali berbuat tidak senonoh dan 'merugikan' mereka, maka secara otomatis akan termentakkan dengan sendirinya. Masyarakat tidak akan lagi mengikuti petuah-petuahnya, malahan akan terkena sanksi sosial dan menjadi bahan gunjingan mereka.

Oleh sebabnya, tokoh agama yang memang benar-benar masyarakat ikuti ialah yang secara konkrit dan tindak lakunya mencerminkan nilai-nilai agama Islam. Karena menempati strata tertinggi dalam masyarakat, maka adat yang berlaku ialah anggota masyarakat harus menghormati tokoh tersebut. Misalnya ketika masyarakat berbicara kepada tokoh itu, sewajibnya menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil —bahasa Jawa halus. Sebaliknya, jika ada anggota masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil, maka akan dicap tidak sopan dan tidak beradab. Bukti penghormatan lainnya seperti ketika digelar tahlilan di rumah warga, maka setting tempat pun dibentuk melingkar. Pemimpin tahlil ada di tengah sehingga tidak ada warga yang membelakangi. 'Haram' hukumnya jika hal itu dilakukan. Terkadang, warga yang mengadakan tahlilan turut memberikan amplop yang berisi uang sebagai bentuk apresiasi kepada pemuka agama yang telah memimpin prosesi tahlilan tersebut, walaupun

sebenarnya bersifat tidak wajib. Dari pemaparan di atas, tokoh agama menjadi pemegang kendali dalam masyarakat dusun Gunung Kekep. Ia menjadi tokoh yang menghegemoni serta memiliki kekuasaan yang tinggi dalam sosial-budaya masyarakatnya.

Fungsi Tahlilan

Dalam kesehariannya, masyarakat dusun Gunung Kekep melaksanakan tahlilan setiap malam Jum'at secara bersama-sama. Hal itu kemudian membuat tahlilan tidak hanya menjadi laku peribadahan semata, namun juga berfungsi sebagai sarana bertemu dan bercengkerama. Masyarakat dusun Gunung Kekep yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, buruh pabrik, atau buruh bangunan yang tersebar di berbagai tempat, mempunyai frekuensi waktu yang sedikit untuk saling bertemu. Mereka ketika pagi hari harus sudah berangkat kerja dan pulang sore hari. Sedangkan malam harinya digunakan untuk istirahat dan bercengkerama dengan keluarga. Atas dasar itu, tahlilan yang dilakukan seminggu sekali ini menjadi sarana yang efektif untuk menjembatani masyarakat dalam bersua dan berbincang. Seringnya, tahlilan dimulai pada pukul 20.00 dan selesai pada pukul 20.30, maka waktu sehabis tahlilan ini dimanfaatkan untuk menikmati hidangan dari tuan rumah sekaligus untuk bercengkerama. Bahkan pembicaraan yang mereka lakukan ini, bisa memakan waktu lebih dari dua jam —lebih lama dari durasi seremonial tahlilan. Tentu, ini adalah obrolan bebas (santai, bukan musyawarah), jika ada jamaah yang mau pulang, maka mereka segera pulang. Jika tidak, maka akan tetap lanjut ngobrol.

Saat masyarakat menjumpai permasalahan bersama dan sekiranya butuh untuk dirapatkan, waktu yang sering dipakai ialah setelah tahlilan selesai. Jadi, waktu sehabis tahlilan ini bersifat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya untuk ngobrol santai, ada kalanya digunakan musyawarah. Dan yang melakukan rapat seperti itu, ialah jamaah tahlilan bapak-bapak karena dianggap merepresentasikan dari keluarga yang mereka pimpin. Oleh sebabnya, hasil rapat dari jamaah tahlilan bapak-bapak berlaku untuk umum, untuk semua penduduk dusun Gunung Kekep. Berbeda hal dengan jamaah tahlilan ibu-ibu dan pemuda/i, walaupun mereka juga sering menggunakan waktu sehabis tahlilan untuk rapat, namun hasil rapatnya hanya berlaku untuk kalangan mereka saja. Misalnya terkait PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang dipegang oleh ibu-ibu atau karang taruna yang diurus oleh pemuda/i.

Dari observasi lapangan, setidaknya tahlilan bagi warga dusun Gunung Kekep memiliki beberapa fungsi. Pertama, secara spiritual tahlilan digunakan sebagai sarana untuk mendoakan orang mati. Bagi orang Islam sendiri, terkhusus yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), sudah menjadi kultur khususnya bahwa tahlilan menjadi budaya yang seakan wajib dilakukan sebagai bentuk penghormatan untuk orang yang meninggal. Masyarakat NU mengamini, bahwa doa bagi orang yang sudah mati dapat meringankan siksa bagi si mayat. Dan kepercayaan seperti ini, masih melekat dengan kuat di dusun Gunung Kekep. Kedua, secara sosial tahlilan berfungsi sebagai perekat atau penjaga keharmonisan masyarakat (Riskasari, 2019). Tahlilan menjadi sarana atau media bagaimana masyarakat bisa duduk bersama dalam satu tempat, entah sebelum atau sesudah acaranya, masyarakat yang berkumpul bisa saling bercakap atau ngobrol. Kondisi seperti inilah yang menjembatani masyarakat pedesaan memiliki waktu yang lebih banyak untuk srawung dengan teman atau tetangga ketimbang masyarakat urban yang menjadi individualistik karena jarang adanya perkumpulan atau komunikasi dengan lingkungan sekitarnya.

Ketiga, tahlilan sebagai identitas. Maksudnya, warga dusun Gunung Kekep sudah kadung memaknai tahlilan sebagai ciri khas dari NU. Implikasinya, mereka yang tidak melakukan tahlilan dianggap sebagai *the others* yang kemudian berefek kepada kesatuan dan persatuan mereka. Apalagi orang yang tidak ikut tahlilan pada hilirnya tidak pula ikut rapat yang dilakukan oleh warga dusun. Orang seperti itu akan dianggap sebagai orang yang jarang srawung, berbeda, dan tidak mau membaur sehingga akan dijauhi oleh masyarakat. Keempat, tahlilan menjadi basis pengumpulan massa dalam perpolitikan masyarakat. Waktu sehabis tahlilan berlangsung, seringkali digunakan sebagai tempat bermusyawarah. Yang dibahas tidak hanya melulu problem masyarakat saja, di momen-momen menjelang pemilu maupun pemilihan kepala desa, musyawarah mengenai politik semakin hangat dan massif diperbincangkan. Siapa yang bakal dipilih, apakah berafiliasi dengan NU atau tidak, apakah bisa memberikan dampak bagus ke masyarakat atau tidak, dan hal-hal semacam itu menjadi bahasan utama dalam musyawarahnya.

Tahlilan dan Politik

Setiap agama mendorong para pemeluknya agar taat dengan ajaran-ajaran yang Tuhan berikan. Berkelindan dengan hal tersebut, Islam telah menegaskan bahwa para ulama adalah pewaris nabi sehingga merekalah yang paling absah

dalam menafsirkan ajaran-ajaran dari agama tersebut (Husein Muhammad, 2020). Hal itu membuat tokoh agama (para ulama) menjadi seseorang yang disakralkan—kata-katanya ditaati dan dianggap benar—seakan-akan merepresentasikan ‘perkataan’ Tuhan. Jika yang ia tafsirkan benar, maka tidak menjadi suatu masalah. Yang menjadi permasalahannya yakni ketika ada tokoh agama, karena telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, kemudian memanfaatkannya untuk tujuan tertentu, misalnya ‘dijual’ suaranya dalam kontestasi politik, atau menggunakan dalil-dalil dari teks-teks agama demi kepentingan pribadinya (Baharuddin, 2019).

Dalam kultur NU, tokoh agama Islam yang lazim disebut kyai ini, menurut Kuntowijoyo (2018) terbagi menjadi dua. Yakni kyai yang berperan aktif di dalam partai politik dan kyai yang secara kultural mengabdikan kepada masyarakat. Yang terakhir ini, sebenarnya jenis kyai yang memiliki peran dan pengaruh penting dalam masyarakat sehingga secara langsung berhubungan dengan politik-sosial masyarakat pedesaan. Dalam praksisnya, ketika ada kader partai politik yang kampanye di dusun Gunung Kekep, akan difilterisasi berdasarkan keterikatannya dengan NU. Penentuan NU atau tidaknya seorang kader politik, akan secara kuat diputuskan oleh kyai atau pemuka agama. Namun tidak bisa dinafikan juga, bahwa banyak jamaah NU yang menjadi kader dari partai PKB atau PPP (Kusmayadi dkk., 2017). Oleh sebabnya, yang sering melakukan infiltrasi di dusun Gunung Kekep ialah menyangkut kedua partai itu. Dan walaupun beda partai, tidak akan terjadi pertentangan diantara mereka, sebab yang menjadi tolak ukur terpentingnya bukan ideologi yang dibawa partai tersebut, melainkan studi terhadap kader partainya, apakah berafiliasi dengan NU atau tidak.

Dalam kondisi seperti itu, Gramsci mengatakan bahwa telah terjadi hegemoni. Yakni hegemoni dalam bentuk persuasif terhadap pikiran masyarakat melalui upaya-upaya moral dan intelektual sehingga membentuk keseragaman ideologi dan pandangan (Khoirurrijal, 2017). Mereka merasa tidak sadar jika dihegemoni, malahan akan membenarkan apa yang telah dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang menghegemoninya. Kepemimpinan yang terjadi dalam masyarakat yang terhegemoni, terbentuk karena adanya persetujuan persuasif yang bersifat sukarela sehingga menimbulkan konotasi yang positif dan mendapat dukungan dari masyarakat. Barangkali dengan hal ini, menjadi sebab utama perihal isu yang ditawarkan oleh kader partai politik di dusun Gunung Kekep hanya tentang wacana-wacana NU. Isu-isu lain menjadi tidak penting bagi masyarakat,

pun demikian juga dengan tokoh agama yang berperan penting membentuk konstruksi berpikir masyarakat yang hanya bergelut dengan wacana formal keagamaan yang bersifat 'ubudiyah.

Secara runtut, ketika masuk era kampanye politik, maka banyak kader parpol atau timses (tim sukses dari kader partai politik) yang menemui tokoh agama dengan izin untuk melakukan kampanye sekaligus meminta dukungannya yang secara otomatis akan diseleksi berdasar ke-NU-annya. Ketika orang tersebut sudah mendapatkan izin, maka mereka akan masuk ke perkumpulan tahlilannya masyarakat. Di saat-saat seperti inilah tahlilan menjadi media kampanye yang paling massif di dusun Gunung Kekep. Tokoh agama kemudian memperkenalkan kader partai yang didukungnya kepada masyarakat, memaparkan apa yang menjadi gagasan orang tersebut. Masyarakat pun dengan setuju akan menerimanya, sehingga terjadilah kesepakatan untuk memilih kader partai itu.

Setidaknya, ketika kader partai politik menggunakan tahlilan sebagai media kampanye di dusun Gunung Kekep akan mendapatkan tiga keuntungan sekaligus. Pertama, masyarakat yang berkumpul bersifat homogen dan memiliki kesamaan ideologi sehingga memudahkan dalam menarik kepercayaan dan dukungannya. Kedua, akomodasinya lebih murah karena dari tempat dan hidangannya sudah disiapkan oleh warga yang mendapat jatah untuk menggelar tahlilan. Ketiga, karena jamaah tahlilan tersebut berafiliasi dengan NU, maka isu yang ditawarkan lebih simpel. Menurut salah satu warga dusun tersebut, saat menjelang pemilu, kebanyakan yang dipaparkan terkait isu-isu yang berhubungan NU, entah dalam dinamika politik, budaya, ataupun keagamaan. Keempat, ketika kader partai atau timsesnya telah mendapat dukungan dari pemuka agama, maka secara otomatis dukungan dari masyarakat akan mengalir dengan kuat. Pemuka agama memiliki peran sentral dalam mempengaruhi keputusan dan pilihan yang diambil oleh masyarakat.

Jika diamati, sebenarnya problem yang dihadapi oleh masyarakat agamis adalah ketika mereka menentang perkataan tokoh agama atau kyai, maka akan dianggap menantang 'perkataan' Tuhan. Tokoh agama dianggap sebagai ejawantah dari maksud agamanya Tuhan. Pada akhirnya, mereka yang menentang tokoh agama akan diklaim sesat dan menjadi musuh bersama oleh kelompoknya. Identitas keagamaan seperti itulah yang mempengaruhi iklim politik dan sosial-budaya di dusun Gunung Kekep. Oleh sebabnya, daya tawar politik atau isu yang ditawarkan pasti tidak akan jauh dari ideologi mereka. Hal ini

membuat lupa, atau bahkan mereka tidak tahu, jika ada masalah yang lebih penting dari hal tersebut. Misalnya seperti isu-isu pertanian, pemerataan pembangunan desa, dan hal-hal lain yang bersinggungan dengan kebutuhan dasar lainnya. Pemaparan di atas, menjadi wajar belaka. Sebab, tokoh agama merupakan orang yang konsen di bidang agama, sehingga hal-hal selain agama luput dibicarakan. Pada akhirnya, masyarakat dusun Gunung Kekep akan menjadi masyarakat yang digerakkan politik identitas agama yang peran sentralnya dihegemoni oleh tokoh agama atau kyai.

3. Kesimpulan

Tahlilan telah menjadi kunci bagaimana ekosistem masyarakat dapat terbentuk. Ritual peribadatan ini tidak hanya bernilai religius semata, tapi juga memiliki sisi-sisi yang membentuk basis nilai sosial masyarakat. Tahlilan membuat mereka memiliki durasi waktu dan frekuensi untuk bertemu lebih intens sehingga menghasilkan ikatan emosional yang kuat antar anggotanya. Ini pula yang menjadi penyebab sifat masyarakat yang condong kepada hal-hal yang seragam. Selain itu, tolak ukur masyarakat dalam menokohkan anggotanya sebagai pemuka agama, diawali ketika seseorang mampu memimpin prosesi berjalannya tahlilan yang lalu merambah ke ritual Islam lainnya. Biasanya, pemuka agama kebanyakan dari alumni pesantren yang secara kultural memiliki hubungan erat dengan Nahdlatul Ulama. Hal ini pula yang menyebabkan identitas ke-NU-an di dusun Gunung Kekep semakin kuat. Alhasil, ketika di masa kontestasi pemilu, masyarakat akan diarahkan oleh pemuka agama agar memilih kandidat yang memiliki kaitan atau yang berafiliasi dengan NU.

Sifat tokoh agama yang dianggap bijak dan dekat dengan Tuhan, membuatnya cenderung ditaati oleh masyarakat sehingga menjadi kunci bagaimana tokoh tersebut menggerakkan ekosistem sosial-budaya masyarakatnya. Setiap hajat atau masalah yang berhubungan dengan orang banyak, termasuk politik, pasti akan menghadirkan tokoh agama sebagai sosok yang dimintai pertimbangan untuk memberikan keputusan alternatif dan solusi. Dalam runtutan inilah pemuka agama menjadi pemegang hegemoni atas masyarakat. Modal organisatoris, kecakapan ilmu agama dan ejawantahnya dalam laku keseharian, menjadi dorongan utama masyarakat untuk taat dan patuh, bahkan berusaha untuk meneladaninya. Pada akhirnya, aturan dan budaya

masyarakat serta hukum adat yang berlaku di dusun Gunung Kekep tidak akan pernah lepas dari dominasi pemuka agama.

Daftrtar Pustaka

- Abimanyu, Petir. (2021). *Ilmu Mistik Kejawen*. Bantul: Noktah.
- Afif, Afthonul. (2020). *Psikologi Suryomentaraman*. Bantul: IRCiSoD.
- Agung, Dewa Agung Gede. (2015). Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional Dan Struktural Konflik. *Sejarah Dan Budaya* 9(2).
- Agustino, Leo. (2020). *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Andi Warisno. (2017). Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi Andi Warisno. *Ri'Ayah* 02.
- Anon. (2009). *Yasin Dan Tahlil*. Semarang: Toha Putra.
- Fahroji. Sejarah Tahlil | NU Online. Retrieved November 26, 2021 (<https://nu.or.id/pustaka/sejarah-tahlil-JPnpB>).
- Baharuddin, Muh. (2019). Partisipasi Publik: Isu Agama Dan Politik Dalam Konteks Demokrasi Di Media Online. *Majalah Ilhiam Semi Populer Komunikasi Massa* 15(2).
- Bauto, Laode Monto. (2016). Perspektif Agama dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23(2).
- Faiz, Abd. Aziz. (2021). *Dasar-Dasar Dan Pokok Pikiran Sosiologi Agama*. Bantul: SUKA-Press.
- Fauziyah, Syifaul, dan Kharisma Nasionalita. (2018). Counter Hegemoni Atas Otoritas Agama Pada Film (Analisis Wacana Kritis Fairclough Pada Film Sang Pencerah). *Informasi* 48(1).
- Fulcher, James. (2021). *Kapitalisme: Sebuah Pengantar Singkat*. Bantul: IRCiSoD.
- Goncing, Nurlira. 2015. "Politik Nahdatul Ulama Dan Orde Baru." *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1(1).
- Husnul Hatimah, dkk. (2021). Tradisi Tahlilan Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. *Syams: Jurnal Kajian Keislaman* 2(1).
- Imaduddin. (2020). Epistemologi Fadhilah Doa Kepada Orang Meninggal: Analisis Perspektif NU dan Muhammadiyah. *Farabi: Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah* 17(1):1–25.

- Jati, Wasisto Raharjo. (2014). Agama dan Politik: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22(1).
- Karim, Abdul. (2017). Makna Ritual Kematian Dalam Tradisi Islam Jawa. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 12(2).
- Khoirurrijal. (2017). Islam Nusantara Sebagai Counter Hegemoni Melawan Radikalisme Agama di Indonesia. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 22(1).
- Kuntowijoyo. (2018). *Muslim Tanpa Masjid*. Bantul: IRCiSoD.
- Kusmayadi, Edi, Subhan Agung, dan M. Ali Andrias. 2017. Model Kepemimpinan Politik Kyai: Studi Peran Kyai Dalam Pergeseran Perilaku Politik Massa NU PKB dan PPP. *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 7(2):21–33.
- Muhammad, Husein. (2020). *Kiai Menggugat, Gus Dur Menjawab*. Bantul: IRCiSoD.
- Mulkhan, Abdul Munir. (2020). *Teologi Kiri*. Bantul: IRCiSoD.
- Newman, Michael. (2021). *Sosialisme: Sebuah Pengantar*. Bantul: IRCiSoD.
- Pals, Daniel L. (2018). *Seven Theories of Religion*. Bantul: IRCiSoD.
- Rahem, Zaitur. (2017). Gerakan Progressif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Menjaga Marwah Pendidikan Keislaman di Nusantara. *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman* 7(1).
- Riskasari, Ana. (2019). Pengaruh Persepsi Tradisi Tahlilan di Kalangan Masyarakat Muhammadiyah Terhadap Relasi Sosial di Desa Gulurejo Lendah Kulon Progo Yogyakarta. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 2(2).
- Rodin, Rhoni. (2013). Tradisi Tahlilan Dan Yasinan. *Ibda': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 11(1).
- Rozaki, Abdur. (2016). *Islam, Oligarki Politik dan Perlawanan Sosial*. Yogyakarta: Setara Press.
- Sayuti, Akhmad, and Ibnu Sodiq. (2018). Dinamika Politik Partai Nahdlatul Ulama di Semarang Tahun 1952-1979. *Journal of Indonesian History* 7(1):1–11.
- Shidqi, Ahmad. (1970). Respon Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Wahabisme dan Implikasinya Bagi Deradikalisasi Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam* 2(1).
- Simuh. (2019). *Pergolakan Pemikiran Dalam Islam*. Bantul: IRCiSoD.
- Singer, Peter. (2021). *Karl Marx*. Bantul: IRCiSoD.
- Siswati, Endah. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 5(1).

- Sunyoto, Agus. (2017). *Atlas Walisongo*. Depok: Pustaka Iman.
- Syam, Syamsuar. (2018). Tradisionalisme Islam Suatu Karakter Dan Pola Pengembangan Islam Di Indonesia. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*.
- Syamsuatir dan Ahmad Mas'ari. (2021). Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara. *Jurnal Kajian Islam Aswaja* 1(1).
- Syukur, Abdul, dan Husnul Qodim. (2017). Islam, Tradisi Lokal, dan Konservasi Alam: Studi Kasus di Kampung Dukuh Kabupaten Garut. *Kalam* 10(1).
- Tajuddin, Yuliyatun. (2014). Walisongo Dalam Strategi Komunikasi Dakwah. *Addin* 8(2).
- Bilfagih, Taufik. (2016). Islam Nusantara; Strategi Kebudayaan NU di Tengah Tantangan Global. *Jurnal Aqlam* 2(1).
- Trotsky, Leon. (2020). *Moral Mereka Dan Moral Kami*. Bantul: Basabasi.
- Turner, Bryan S. (2012). *Relasi Agama & Teori Sosial Kontemporer*. Bantul: IRCiSoD.
- Umar, Ahmad Rizki Muhammad. (2020). *Dakwah Dan Kuasa*. Bantul: Basabasi.
- Wafa, Moh Ali. (2021). Taat Bersyarat Terhadap Ulil Amri; Mengurai Relasi antara Rakyat dan Pemimpin Dalam Konteks Fikih Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law* 5(1):75–86.
- Yusa, I. Gede, Ni Ketut Sri Utari, I. Nengah Suantra, dan Gede Marhaendra Wija Atmaja. (2016). *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.
- Zaprul Khan. (2020). *Rekonstruksi Paradigma Maqashidu Asy-Syariah*. Bantul: IRCiSoD.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).